



Analisis Kebijakan Inovasi Kurikulum Pendidikan untuk Mempersiapkan Generasi Penerus Indonesia Emas 2045: Peran Guru dalam Implementasinya

Djoko Sri Bimo¹, Triono Ali Mustofa², Viky Nur Vambudi³

¹Universitas Terbuka Surakarta, Indonesia

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: djokosb@ecampus.ut.ac.id, tam763@ums.ac.id, o300250005@student.ums.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-17 Keywords: <i>Teachers; Innovation; Policy; Curriculum; Education.</i>	This study explores the implementation of education curriculum policies in Indonesia with a focus on integrating Deep Learning principles. The purpose of this study is to analyze Deep Learning curriculum innovation policies in Indonesian education in relation to achieving the Indonesia Emas 2045 vision. In addition, this study also seeks to identify the role of teachers in implementing Deep Learning curriculum innovation policies. A qualitative policy analysis approach supported by comparative case studies is used to examine the practical implications of this policy and its alignment with the Indonesia 2045 vision. The findings highlight the important role of teachers in translating policy into practice, emphasizing the need for pedagogical and technological competencies. Challenges such as infrastructure limitations, resistance to change, and high workloads hinder the full potential of this policy. However, factors such as strong leadership, leveraging the strengths of digital native students, and increasing industry stakeholder engagement provide significant support for successful implementation. This study concludes that achieving Indonesia's 2045 education goals requires collaborative efforts between educators, school leaders, and external partners to strengthen teacher capacity and ensure policy success. This study makes a significant contribution to enriching the literature on educational policy analysis, particularly in linking Indonesia's educational curriculum innovation policy with the pedagogical implementation of Deep Learning, as well as highlighting the crucial role of teachers in realizing the Indonesia Emas 2045 vision through capacity building and collaboration in education.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-17 Kata kunci: <i>Guru; Inovasi; Kebijakan; Kurikulum; Pendidikan.</i>	Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan fokus pada integrasi prinsip-prinsip Deep Learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan inovasi kurikulum Deep Learning dalam pendidikan Indonesia terkait dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi peran guru dalam implementasi kebijakan inovasi kurikulum Deep Learning. Pendekatan analisis kebijakan kualitatif yang didukung oleh studi kasus komparatif, digunakan untuk memeriksa implikasi praktis kebijakan ini dan keselarannya dengan visi Indonesia 2045. Temuan penelitian menyoroti peran penting guru dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik dengan menekankan perlunya kompetensi pedagogis dan teknologi. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan beban kerja yang tinggi menghambat potensi penuh kebijakan ini. Namun faktor-faktor seperti kepemimpinan yang kuat, pemanfaatan kekuatan siswa digital native, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan industri memberikan dukungan signifikan untuk implementasi yang sukses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan pendidikan Indonesia 2045 memerlukan upaya kolaboratif antara pendidik, pemimpin sekolah, dan mitra eksternal untuk memperkuat kapasitas guru dan memastikan keberhasilan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur tentang analisis kebijakan pendidikan, khususnya dalam menghubungkan kebijakan inovasi kurikulum pendidikan di Indonesia dengan implementasi pedagogis Deep Learning, serta menyoroti peran krusial guru dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kapasitas dan kolaborasi dalam pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Tantangan yang semakin meningkat dalam lanskap pendidikan Indonesia semakin tercermin

dalam tren sosial-bahavioral yang mengkhawatirkan di kalangan pemuda (Khairunnisa et al., 2023). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Indonesia dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengungkapkan lonjakan yang mengkhawatirkan dalam kasus kenakalan remaja. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 22-25% siswa mengalami berbagai bentuk perundungan di sekolah (AB. Musyafa Fathoni et al., 2024). Selain itu, survei menunjukkan bahwa sekitar 19,3% siswa SMA terlibat dalam perkelahian fisik, dan paparan terhadap disinformasi digital serta konten radikal tetap menjadi ancaman signifikan (Melawati, 2024).

Fenomena-fenomena ini bukan hanya masalah sosial, melainkan juga terkait erat dengan paradigma pendidikan yang sering kali lebih mengutamakan hafalan dan ujian standar daripada pengembangan karakter kritis, pemikiran etis, dan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks. Ketidaksesuaian antara hasil pendidikan saat ini dengan kebutuhan masa depan bangsa ini menekankan urgensi yang sangat penting untuk melakukan inovasi kurikulum yang mendasar.

Visi nasional "Indonesia Emas 2045" merupakan tonggak strategis yang bertepatan dengan peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia (Rahvy, 2025). Visi ini membayangkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, didorong oleh bonus demografi yang sangat besar. Pilar utama untuk mencapai visi ini adalah transformasi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan bukan hanya sebagai elemen pendukung, tetapi sebagai mesin fundamental yang bertugas mempersiapkan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki karakter kuat, kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi, dan ketahanan (daya saing global). Keberhasilan visi ini sangat bergantung pada kemampuan sistem pendidikan untuk bertransformasi dari model tradisional yang transformatif menjadi model yang lebih bersifat transformasional dan siap menghadapi masa depan.

Menanggapi kebutuhan ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan serangkaian inisiatif kebijakan transformasional di bawah kerangka "Merdeka Belajar" (Wiyono et al., 2025). Perubahan kebijakan ini melampaui perubahan konten kurikulum (Kurikulum Merdeka) untuk merangkul filosofi pedagogis yang lebih mendalam yaitu Deep Learning (Deep Learning). Deep Learning, sebagaimana yang dipahami oleh para ahli dan didukung oleh kerangka kerja pendidikan global seperti Pendidikan 2030 dari OECD, merujuk pada

proses di mana siswa menguasai kompetensi yang memungkinkan mereka untuk menciptakan, menerapkan, dan mentransfer pengetahuan untuk memecahkan masalah kompleks di dunia nyata. Pembelajaran ini ditandai dengan pengembangan 6C: Karakter, Kewarganegaraan, Kolaborasi, Komunikasi, Kreativitas, dan Pemikiran Kritis (Fitriza et al., 2023).

Integrasi kerangka Deep Learning ke dalam kebijakan kurikulum nasional bukanlah program tambahan, tetapi sebuah reorientasi pedagogis yang mendasar. Kurikulum diposisikan sebagai ekosistem dinamis yang dirancang untuk menumbuhkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan Indonesia untuk berkembang di abad ke-21 dan mewujudkan ambisi 2045. Inovasi kebijakan ini, dengan demikian, menjadi jembatan krusial antara keadaan pendidikan saat ini dan hasil masa depan yang diinginkan dari Indonesia Emas 2045.

Studi-studi sebelumnya mengenai reformasi pendidikan Indonesia umumnya berfokus pada struktur kurikulum (Hidayat et al., 2025), integrasi teknologi (Agustina et al., 2025), atau kompetensi umum guru (Daga et al., 2023) secara terpisah. Namun, terdapat celah signifikan dalam literatur akademik yang secara eksplisit menyelidiki persimpangan antara kebijakan nasional, kerangka pedagogis khusus Deep Learning, dan peran penting guru dalam konteks unik mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang mendalam yang menghubungkan desain kebijakan tingkat makro dengan implementasi kelas tingkat mikro, dengan guru sebagai agen perubahan utama.

Meskipun kebijakan memberikan arah dan kurikulum memberikan peta jalan, keberhasilan akhir dari setiap inovasi pendidikan bergantung pada peran guru. Implementasi kurikulum Deep Learning memerlukan pergeseran mendasar dalam peran guru dari seorang penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran, desainer, dan motivator. Guru adalah aktor kunci yang menerjemahkan aspirasi kebijakan menjadi praktik pedagogis (Song et al., 2025). Kemampuan mereka untuk menciptakan pengalaman belajar yang otentik, membina kemitraan pembelajaran yang inklusif, dan menilai kompetensi-kompetensi kompleks akan menentukan efektivitas inovasi ini. Oleh karena itu, memahami dan memberdayakan peran mereka bukan hanya penting, tetapi sangat

penting untuk membina generasi masa depan yang siap bersaing di kancah global.

Atas dasar hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi kurikulum Deep Learning dalam pendidikan Indonesia terkait dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi peran guru dalam implementasi kebijakan inovasi kurikulum Deep Learning.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang analisis kebijakan pendidikan, studi kurikulum, dan manajemen perubahan dalam pendidikan dengan menyediakan model terintegrasi yang menghubungkan kebijakan, pedagogi (Deep Learning), dan agen guru dalam konteks nasional yang spesifik. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan referensi berharga bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan regional, praktisi pendidikan, dan lembaga pelatihan guru (LPTK) dalam merancang strategi implementasi yang lebih efektif, program pengembangan profesional, dan sistem dukungan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan untuk Indonesia Emas 2045.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang kerangka kebijakan dan dinamika implementasinya. Desain utama yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif, yang dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk secara kritis memeriksa niat, isi, dan hasil yang dipersepsikan dari suatu kebijakan pendidikan (Yang & Li, 2018). Untuk membumikan analisis ini dalam realitas praktis, analisis kebijakan ini dilengkapi dengan desain studi kasus komparatif. Elemen komparatif ini memungkinkan untuk memeriksa bagaimana kebijakan besar tentang inovasi kurikulum Deep Learning diinterpretasikan dan diterapkan di berbagai konteks, memberikan wawasan kontekstual yang kaya mengenai faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat implementasinya.

Sumber data untuk penelitian ini sebagian besar bersifat dokumenter. Sumber data primer terdiri dari dokumen kebijakan publik resmi dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal

tersebut termasuk pedoman resmi untuk "Kurikulum Merdeka," peraturan menteri (Peraturan Menteri), serta brosur resmi dan video penjelasan yang mengartikulasikan prinsip-prinsip "Deep Learning" atau "Pembelajaran Berkualitas" dalam konteks Indonesia. Sumber data sekunder mencakup berbagai literatur yang ada, termasuk artikel penelitian sebelumnya yang diterbitkan di jurnal internasional dan nasional, laporan resmi dari lembaga pendidikan (misalnya, Balitbang Kemendikbudristek, BPS), dan artikel berita yang kredibel yang mendokumentasikan proses implementasi yang sedang berlangsung serta evaluasi tahap awal.

Analisis data akan dilakukan secara sistematis dalam dua tahap terintegrasi. Pertama, analisis konten akan diterapkan pada dokumen kebijakan dan literatur sekunder. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan wacana yang terkait dengan konseptualisasi Deep Learning dan peran serta kompetensi yang diharapkan bagi guru dalam kerangka kebijakan tersebut. Tahap ini bertujuan untuk mendekonstruksi visi kebijakan dan terjemahannya dalam praktik. Selanjutnya, kerangka analisis kebijakan publik akan diterapkan. Tahap ini bergerak melampaui deskripsi menuju evaluasi, dengan memanfaatkan model analisis kebijakan yang diakui untuk menilai koherensi kebijakan, kelayakan, dan potensi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan generasi yang kompetitif bagi Indonesia Emas 2045 (Stéger, 2014). Analisis ini akan mengkritisi keselarasan antara tujuan kebijakan, peran yang diberikan kepada guru, dan struktur dukungan yang ada, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kesenjangan dan titik leverage untuk implementasi yang sukses.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Inovasi Kurikulum di Indonesia

Analisis terhadap dokumen kebijakan pendidikan Indonesia yang terbaru, terutama "Kurikulum Merdeka," mengungkapkan adanya pergeseran yang signifikan dan disengaja menuju pengintegrasian prinsip-prinsip Deep Learning (Amalia et al., 2025). Hal tersebut bukan hanya perubahan terminologis, tetapi reorientasi mendasar yang bertujuan untuk beralih dari kurikulum yang berbasis materi berat menuju fokus pengembangan kompetensi siswa. Kebijakan

ini secara eksplisit menekankan pengembangan pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan karakter.

Penyesuaian ini dengan kerangka Deep Learning global, memposisikan kurikulum sebagai instrumen strategis untuk mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas abad ke-21. Narasi kebijakan ini secara konsisten mengaitkan kompetensi-kompetensi tersebut dengan agenda nasional yang lebih luas dari Indonesia Emas 2045, dengan menggambarkan hasil pendidikan sebagai input utama untuk mencapai negara yang berdaulat, maju, dan makmur (Apriliyana, 2025).

Evaluasi kritis terhadap isi kebijakan menunjukkan keselarasan konseptual yang kuat dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Penekanan visi terhadap sumber daya manusia unggul secara langsung ditangani oleh fokus kurikulum untuk menciptakan pembelajar seumur hidup dan pemecah masalah yang inovatif. Dengan memprioritaskan kompetensi seperti kewarganegaraan dan karakter, kebijakan ini juga mengatasi tantangan sosial dan budaya dengan tujuan membangun generasi yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkarakter etis dan bertanggung jawab sosial. Sehingga dapat mengurangi isu-isu seperti radikalisasi dan intoleransi yang mengancam kohesi nasional.

Fleksibilitas kebijakan yang memungkinkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa dan konten lokal merupakan kekuatan strategis yang memungkinkan pendidikan lebih relevan dan responsif terhadap potensi regional yang beragam di seluruh nusantara. Namun, terdapat celah antara visi ambisius kebijakan dan pedoman operasionalnya. Meskipun dokumen kebijakan secara fasih menggambarkan "apa" dan "mengapa" dari Deep Learning, "bagaimana" terutama mekanisme pedagogis rinci untuk guru dengan berbagai tingkat kompetensi sering kali kurang preskriptif.

Hal ini dapat menyebabkan variasi interpretasi yang signifikan selama implementasi. Keberhasilan kebijakan ini dalam berkontribusi pada Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada terjemahan efektifnya di tingkat sekolah dan kelas, di mana guru menjadi variabel yang paling krusial. Kebijakan ini mengasumsikan adanya tingkat otonomi pedagogis dan kecanggihan yang mungkin belum sepenuhnya hadir di

seluruh tenaga pendidik Indonesia yang luas dan beragam.

Selain itu, reformasi penilaian yang diusulkan dalam Kurikulum Merdeka yang beralih dari ujian sumatif yang berisiko tinggi ke penilaian formatif dan otentik terhadap kompetensi sangat penting untuk memungkinkan Deep Learning. Namun, ini mewakili salah satu tantangan yang paling mendalam. Ekosistem yang ada termasuk ekspektasi orang tua dan ujian masuk universitas, masih sangat mendukung metrik tradisional keberhasilan akademik (Bulut et al., 2025). Hal tersebut menciptakan lingkungan yang saling bertentangan di mana guru didorong untuk menerapkan Deep Learning, tetapi pada saat yang sama dinilai oleh sistem yang sejalan dengan paradigma lama yang berpotensi menyebabkan pemisahan antara kebijakan dan praktik.

Meskipun desain kebijakan Kurikulum Merdeka secara konseptual kuat dan selaras dengan kebutuhan strategis Indonesia Emas 2045, efektivitas akhirnya tidak dijamin hanya dengan desainnya. Potensinya hanya akan terwujud melalui proses implementasi yang berkomitmen, didukung dengan baik, dan dipahami dengan baik yang memprioritaskan pengembangan kapasitas di garis depan para guru. Kebijakan ini merupakan langkah yang diperlukan dan menjanjikan, tetapi ini adalah awal dari perjalanan panjang transformasi pendidikan.

B. Peran Guru dalam Implementasi Kebijakan Inovasi Kurikulum Deep Learning

Implementasi inovasi kurikulum Deep Learning hampir sepenuhnya bergantung pada peran guru yang beralih dari penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh guru adalah pergeseran identitas mendasar ini. Banyak pendidik, terutama yang memiliki pengalaman luas dalam sistem tradisional, kesulitan dalam mendefinisikan kembali tujuan mereka di kelas. Guru menghadapi kesulitan praktis dalam merancang pengalaman pembelajaran berbasis proyek (PBL), memfasilitasi penyelidikan yang dipimpin siswa, dan menilai kompetensi-kompetensi kompleks seperti kolaborasi serta pemikiran kritis sambil mengelola ukuran kelas yang besar dan beban

administratif yang ada (Nofamataro Zebua, 2025).

Di luar keterampilan pedagogis, tantangan signifikan terletak pada penguasaan alat teknologi yang menjadi bagian integral dari lingkungan Deep Learning modern. Meskipun kebijakan ini mendorong integrasi digital, terdapat jurang digital yang jelas di antara para guru. Tidak semua pendidik memiliki kepercayaan diri atau kefasihan untuk menggunakan platform digital untuk kolaborasi, penelitian, dan ekspresi kreatif, yang berpotensi memperburuk ketidaksetaraan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hambatan teknologi ini bukan hanya tentang akses terhadap perangkat keras dan konektivitas internet, tetapi lebih penting lagi, tentang pengetahuan pedagogis digital mengetahui bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran secara bermakna daripada sekadar menggantikan alat analog.

Mengenai pengembangan profesional, temuan menunjukkan gambaran yang campuran. Pemerintah, melalui Dirjen GTK Kemendikbudristek telah meluncurkan program pelatihan besar-besaran, terutama melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Meskipun platform ini menyediakan sumber daya dan modul pelatihan yang krusial, umpan balik dari berbagai komunitas guru menunjukkan bahwa pelatihan tersebut terkadang bersifat umum dan teoretis, kurang mendapatkan pendampingan praktis dan kontekstual yang berkelanjutan. Pendekatan webinar "satu ukuran untuk semua" sering gagal untuk mengatasi dilema spesifik yang dihadapi guru dalam konteks sekolah mereka yang unik, meninggalkan mereka terinspirasi tetapi tidak cukup dilengkapi untuk menerjemahkan teori ke dalam praktik sehari-hari.

Keterampilan yang dibutuhkan bagi guru dalam paradigma baru ini sangat beragam. Guru membutuhkan dasar yang kuat dalam Pedagogical Content Knowledge (PCK) untuk merancang pengalaman Deep Learning dalam bidang studi mereka. Selain itu, mereka memerlukan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) untuk mengintegrasikan teknologi dengan mulus dalam cara yang memperdalam pemahaman materi pelajaran (Habiyaremye et al., 2022). Selain itu, guru juga dituntut memiliki keterampilan lunak seperti fleksibilitas, ketahanan, dan

kemampuan komunikasi yang kuat untuk mengelola kelas yang dinamis dan membangun kemitraan pembelajaran dengan siswa. Mungkin keterampilan yang paling krusial adalah menjadi praktisi reflektif seorang guru yang dapat terus mengevaluasi praktiknya sendiri, menyesuaikan strateginya, dan terlibat dalam pembelajaran seumur hidup.

Oleh karena itu, memberdayakan guru memerlukan langkah lebih lanjut dari sekadar pelatihan satu kali menuju penciptaan Professional Learning Community (PLC) di mana guru dapat berkolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan memecahkan masalah bersama. Implementasi yang berkelanjutan bergantung pada penciptaan ekosistem yang mendukung yang mencakup akses ke mentor, pelatih instruksional, dan peluang observasi sejawat (Chamberlain et al., 2011). Hal tersebut mengubah pengembangan profesional dari intervensi top-down menjadi proses kolaboratif dan berkelanjutan dari perubahan budaya dalam sekolah, yang sangat penting untuk perubahan mendalam dan berkelanjutan yang diminta oleh kebijakan ini.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung

Keberhasilan implementasi kurikulum Deep Learning dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara faktor penghambat dan pendukung. Mengidentifikasi faktor-faktor ini sangat penting untuk mengembangkan strategi mitigasi dan penguatan yang efektif. Faktor penghambat utama adalah infrastruktur yang tidak memadai di banyak daerah di Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih berjuang dengan listrik yang tidak stabil, akses internet yang terbatas, dan kurangnya perangkat digital, sehingga hampir tidak mungkin untuk menerapkan strategi Deep Learning berbasis teknologi, yang memperlebar kesenjangan kesetaraan (Suwandi et al., 2024).

Hambatan signifikan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dalam budaya pendidikan itu sendiri. Resistensi ini bisa berasal dari guru yang nyaman dengan metode tradisional, pemimpin sekolah yang ragu untuk mendukung pendekatan baru. Bahkan terdapat orang tua yang skeptis terhadap model pendidikan yang berbeda dari pengalaman sekolah mereka yang lebih mengutamakan proses daripada hafalan

untuk ujian. Inersia budaya ini dapat membunuh inovasi dan menyebabkan kepatuhan yang dangkal daripada keterlibatan mendalam dengan filosofi kurikulum.

Selain itu, beban kerja dan kendala waktu merupakan hambatan praktis yang besar. Merancang unit pembelajaran berbasis proyek yang otentik dan memberikan umpan balik formatif terhadap kompetensi sangat memakan waktu. Guru yang sudah terbebani dengan tugas administratif mungkin merasa tidak berkelanjutan untuk mendedikasikan waktu yang diperlukan untuk perencanaan kurikulum yang mendalam ini dapat menyebabkan kelelahan atau kembali ke rencana pelajaran tradisional yang lebih sederhana. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan sistemik untuk melindungi waktu guru agar dapat berkolaborasi dan mengembangkan kurikulum.

Di sisi lain, beberapa faktor pendukung dapat mempercepat implementasi. Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen di tingkat sekolah atau distrik mungkin merupakan faktor pendorong yang paling krusial. Kepala sekolah yang memahami, percaya, dan secara aktif mendukung Deep Learning dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan sumber daya, serta melindungi guru untuk bereksperimen dan berinovasi tanpa takut gagal. Kepemimpinan mereka sangat penting dalam membangun visi bersama dan budaya perbaikan berkelanjutan di dalam sekolah.

Status digital native siswa adalah aset yang kuat. Familiaritas dan kenyamanan siswa dengan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan kolaboratif. Guru dapat merancang pembelajaran di mana siswa mengambil peran aktif dalam menggunakan teknologi untuk penelitian, kreasi, dan presentasi telah mengubah dinamika kelas menuju model yang lebih berpusat pada siswa (Nugroho et al., 2024). Kecenderungan alami tersebut dapat membantu mendorong adopsi elemen digital dalam kerangka Deep Learning.

Akhirnya, keterlibatan industri dan pemangku kepentingan komunitas yang semakin besar memberikan dukungan eksternal yang sangat penting. Kemitraan dengan universitas, perusahaan teknologi, dan bisnis lokal dapat menyediakan masalah dunia nyata bagi siswa untuk diselesaikan.

Mentor dan sumber daya menjadikan pembelajaran lebih otentik dan relevan (Cao et al., 2024). Hal tersebut sangat selaras dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa bagi dunia kerja global dan memberikan hubungan yang nyata antara kelas dan masa depan yang dibayangkan oleh Indonesia Emas 2045, menciptakan loop penguatan yang kuat untuk nilai dan relevansi kurikulum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan inovasi Kurikulum Merdeka di Indonesia menunjukkan pergeseran penting menuju pengintegrasian prinsip Deep Learning, dengan penekanan pada pengembangan kompetensi siswa seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan karakter. Meskipun kebijakan ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, tantangan utama terletak pada implementasi yang bergantung pada keberhasilan penerjemahan kebijakan ke dalam praktik di tingkat sekolah, di mana peran guru sangat krusial. Guru dihadapkan pada perubahan peran, dari penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran, yang memerlukan penguasaan keterampilan pedagogis dan teknologi. Selain itu, tantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai, resistensi terhadap perubahan, dan beban kerja yang tinggi menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan ini. Namun, faktor pendukung seperti kepemimpinan yang kuat, pemanfaatan potensi digital native siswa, dan keterlibatan industri serta pemangku kepentingan komunitas dapat mempercepat keberhasilan implementasi. Untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara guru, pemimpin sekolah, dan pihak eksternal, serta penguatan kapasitas di tingkat guru yang menjadi agen perubahan utama dalam pendidikan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Kebijakan Inovasi Kurikulum Pendidikan untuk Mempersiapkan Generasi Penerus Indonesia Emas 2045: Peran Guru dalam Implementasinya.

DAFTAR RUJUKAN

- AB. Musyafa Fathoni, Mubaidi Sulaeman, Elima Amiroh Nur Azizah, Yuslia Styawati, & Mahendra Utama Cahya Ramadhan. (2024). The New Direction of Indonesian Character Education: Bullying, Moral Decadence, and Juvenile Delinquency. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 22–39. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.7759>
- Agustina, R. H., Alfiyanto, A., Suhendri, S., Wihardjo, E., & Pranajaya, S. A. (2025). Optimizing Learning: Adaptive Technology Integration in Indonesia's Education System. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 16(2), 304–317. <https://doi.org/10.37640/jip.v16i2.2293>
- Amalia, E. R., Dwi Bhakti Indri M, Khoiriyati, S., Ummah, N., Oviani, M., Kusumawardhani, J., & Umayyah, U. (2025). Bridging Educational Reform and Faith: Evaluating Kurikulum Merdeka's Compatibility with Islamic Values in Madrasahs. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(4), 483–500. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i4.1413>
- Apriliyana, N. P. (2025). Transforming Education Through Deep Learning Design: Integrating Four Key Elements in School Practice. *Molang: Journal Islamic Education*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.32806/jm.v3i1.843>
- Bulut, O., Gorgun, G., & Yildirim-Erbasli, S. N. (2025). The impact of frequency and stakes of formative assessment on student achievement in higher education: A learning analytics study. *Journal of Computer Assisted Learning*, 41(1). <https://doi.org/10.1111/jcal.13087>
- Cao, D., Chen, J., & Liu, S. (2024). University-Industry Collaboration in Managing Translation Projects: Perceptions and Responses From Students, Instructors, and Industry Partners. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 67(3), 352–368. <https://doi.org/10.1109/TPC.2024.3411922>
- Chamberlain, J. M., D'Artrey, M., & Rowe, D.-A. (2011). Peer observation of teaching: A decoupled process. *Active Learning in Higher Education*, 12(3), 189–201. <https://doi.org/10.1177/1469787411415083>
- Daga, A. T., Wahyudin, D., & Susilana, R. (2023). Students' Perception of Elementary School Teachers' Competency: Indonesian Education Sustainability. *Sustainability*, 15(2), 919. <https://doi.org/10.3390/su15020919>
- Fitrizza, Z., Wahyudin, D., & Dewi, L. (2023). Relation of Learning Compass 2030 and Management Regulation of Merdeka Curriculum for School and Higher Education in Indonesia. *Journal of Disruptive Learning Innovation (JODLI)*, 4(2), 93. <https://doi.org/10.17977/um072v4i22023p93-106>
- Habiyaremye, H. T., Ntivuguruzwa, C., & Ntawiha, P. (2022). From pedagogical toward technological pedagogical content knowledge frameworks and their effectiveness in teaching mathematics: A mapping review. *F1000Research*, 11, 1029. <https://doi.org/10.12688/f1000research.125073.1>
- Hidayat, M. T., Suryadi, S., Latifannisa, N., Sari, S. N., & Rino, R. (2025). Evolution of The Education Curriculum in Indonesia. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 6(2), 381–395. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v6i2.1312>
- Khairunnisa, A., Ivanka, D., Tris Finanda, H., Oktavia, L., Afni Wijaya, N., Abd Rahman, M., & Natalia, N. (2023). Juvenile Delinquency That Leads To Declining Mental Health. *BICC Proceedings*, 1, 128–131. <https://doi.org/10.30983/bicc.v1i1.47>
- Melawati, L. B. (2024). Exploration of child bullying cases and school-based anti-bullying interventions and community empowerment in Semarang City. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 2(1). <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v2i1.2024.879>
- Nofamataro Zebua. (2025). Education Transformation: Implementation of Deep Learning in 21st-Century Learning. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 146–152.

- <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i2.1405>
- Nugroho, B. S., Rosyadi, M. I., Setyorini, W. F., Fauziati, E., & Sumardjoko, B. (2024). Perception of Digital Technology in Project Based Learning for Digital Native Students in Elementary School. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 13–17.
<https://doi.org/10.33084/tunas.v10i1.8979>
- Rahvy, A. P. (2025). STRENGTHENING MATERNAL AND CHILD HEALTH SYSTEM TOWARDS INDONESIA EMAS 2045. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 1–3.
<https://doi.org/10.20473/jaki.v13i1.2025.1-3>
- Song, Y., Wang, J., Chen, Y., Zhang, J., & Xu, C. (2025). Exploring the potential of adopting an interactive mixed-reality tool in teacher professional development: Impact on teachers' self-efficacy and practical competencies of dialogic pedagogy. *Computers & Education*, 238, 105390.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105390>
- Stéger, C. (2014). Review and Analysis of the <scp>EU</scp> Teacher-related Policies and Activities. *European Journal of Education*, 49(3), 332–347.
<https://doi.org/10.1111/ejed.12089>
- Suwandi, Putri, R., & Sulastri. (2024). Inovasi Pendidikan dengan Menggunakan Model Deep Learning di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 69–77.
<https://doi.org/10.61476/186hvh28>
- Wiyono, B. B., Komariah, A., Hidayat, H., & Kusumaningrum, D. E. (2025). The structural effects of evaluation types in the implementation process of the independent learning program in higher education. *Discover Sustainability*, 6(1), 321.
<https://doi.org/10.1007/s43621-025-01171-3>
- Yang, W., & Li, H. (2018). Cultural ideology matters in early childhood curriculum innovations: a comparative case study of Chinese kindergartens between Hong Kong and Shenzhen. *Journal of Curriculum Studies*, 50(4), 560–585.
<https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1428367>